PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi)

Anitasari

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Regional Work Units Cimahi. With the problem of the weakness in the area of financial accounting system in the process of recording that has not been effective and weaknesses in performance-based budget planning and implementation are not optimal causing local government performance is not optimal. The purpose of this study is to analyze and assess how much influence the area of financial accounting systems and performance-based budgets of local government performance in SKPD Cimahi Government.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the area of financial accounting system variables, variable performance-based budgeting, and performance of local government. And the verification method used by the statistical test SEM Partial Least Squre (PLS) to determine the effect of regional financial accounting system and performance-based budgeting. Mechanical withdrawal sample using saturation sampling for total population and the same sample of 25 SKPD Cimahi Government. The unit of observation in this study is the Sub Division and Reporting Program.

These results indicate that the area of financial accounting system has positive influence on local government performance and performance-based budgeting positive effect on the performance of local government in Cimahi Government SKPD.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Performance-Based Budgeting, the Local Government Performance.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim:2007). (Rahmad Hidayat, 2015)

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat

sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai. (Ira Halidayati, 2014)

Kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, 2013:25)

Tidak hanya kinerja yang menjadi sorotan saat ini, tetapi juga anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. (Indra Bastian, 2010:192)

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat. (Mardiasmo, 2009)

Anggaran berbasis kinerja adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012:43)

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). (Sem Paulus Silahi, 2012)

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almanda (2013) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. (Rahmad Hidayat, 2015)

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". (Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim, 2014:83)

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi. (Abdul Halim, 2012:40)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang terjadi:

1. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik sistem akuntansi keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Indra Bastian (2010:202) Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output (output measurement*).

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Indra Bastian (2010:329) bahwa Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:35), menyatakan bahwa organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politk yang besar. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efesiensi, dan efektivitas (*value for money*),

akuntansi memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter.

Menurut Mardiasmo (2009:84) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:51) menyatakan bahwa kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut Mardiasmo (2009:40) menyatakan bahwa penyusunan APBD dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2013:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlak u untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabelvariabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2013:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2).
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2013:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah 25 SKPD Pemerintahan Kota Cimahi.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library reserach*). Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Metode pengamatan atau (*Observation)*
      Metode pengamatan atau (*Observation)* adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
   b. Kuesioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Adapun kuesioner dilakukan kepada pegawai bagian akuntansi, bagian bendahara dan subag keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri adalah sebagai berikut:

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah sebagai berikut:
"Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Cimahi. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan SKPD Kota Cimahi sebanyak 25 SKPD, yang berjumlah 25 orang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:
"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa :
"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Cimahi sebanyak 25 SKPD.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada 25 SKPD Kota Cimahi yang beralamat di Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Komp. Pemkot Cimahi.

3.4.3.1 Waktu Penelitian

No.	Deskripsi Kegiatan	2016								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
1.	**Pra Survei**									
	a. Persiapan judul									
	b. Persiapan teori									
	c. Pengajuan judul									
	d. Mencari perusahaan									
2.	**Usulan Penelitian**									
	a. Penulisan UP									
	b. Bimbingan UP									
	c. Sidang UP									
	d. Revisi UP									
3.	**Pengumpulan Data**									
4.	**Pengolahan Data**									
5.	**Penyusunan Skripsi**									
	a. Bimbingan Skripsi									
	b. Sidang Skripsi									
	c. Revisi Skripsi									
	d. Pengumpulan draf Skripsi									
6.	Wisuda									

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013:3) validitas didefinisikan sebagai berikut:

"Valid adalah menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Berdasarkan pengertian di atas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43) uji realibitas adalah sebagai berikut:

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan dan kepercayaan alat pengungkapan dari data. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman-Brown Correlation*) atau Teknik Belah Dua, dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{2r_1}{1 + r_b}$$

Sumber: Sugiyono (2013:131)

Keterangan:

R = *Realibility*
r_1 = Reliabilitas internal seluruh item
r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

3.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.
2. Analisis Data Verifikatif
   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0. Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang

mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan tingkat pengembalian kuisoner (*respon rate*), karakteristik responden, hasil uji validitas dan reabilitas alat ukur, hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dan kinerja pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.1 Pengujian Kualitas Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas

   Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana validitasan suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan sahih atau valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan yakni sebesar 0,3. Hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Alat ukur selain harus valid juga harus memiliki reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan andal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian digunakan *Spearman Brown*. Suatu konstruk dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar atau sama dengan 0,7. Dari hasil pengujian reliabilitas, terlihat bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh masing-masing variabel lebih besar dari titik kritis 0,7 yang menunjukan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukan keandalannya sehingga sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel sistem akuntansi keuagan daerah sebesar 64,17%. Nilai 64,17% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 35,83% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah.

4.1.3 Analisis Deskriptif Anggaran Berbasis Kinerja

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 60,42%. Nilai 60,42% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 39,58% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam anggaran berbasis kinerja.

4.1.4 Analisis Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 53,57%. Nilai 53,57% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 46,43% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kinerja pemerintah daerah.

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SmartPLS 2.0, maka hasil analisis verifikatif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 0,633 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi cukup dengan arah positif. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik pula.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 32,2% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 32,2% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 67,8%, tetapi 19,5% diantaranya dipengaruhi oleh variabel X_2 yaitu anggaran berbasis kinerja dan sisanya sebesar 48,3 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Hasil Analisis Verifikatif Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SmartPLS 2.0, maka hasil analisis verifikatif anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 0,537 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sangat rendah dengan arah positif. Artinya anggaran berbasis kinerja yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik pula.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 19,5% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi anggaran berbasis kinerja sebesar 19,5% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 80,5% tetapi 32,2% diantaranya dipengaruhi oleh variabel X_1 yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sisanya sebesar 48,3 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

   Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai thitung sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 5,212 lebih besar dari tkritis (1,96). Karena nilai thitung lebih besar dibanding ttabel, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

   Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai thitung anggaran berbasis kinerja sebesar 4,107 lebih besar dari tkritis (1,96). Karena nilai thitung lebih besar dibanding ttabel, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga

Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar 32,2% terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,633 yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi. Arah hubungan positif sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 32,2% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 67,8% antara lain Pengawasan Internal (Ira Halidayati, 2009), Pengelolaan Keuangan Daerah (Rahmad Hidayat, 2009), Partisipasi Anggaran (Rahmi Nur Emilia, Willy Abdillah, dan Abdullah, 2013), Penerapan Good Government (Rico Ales Sndra, Kennedy, Rheny, 2014), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sem Paulus Silalahi, 2012).

Kemudian hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai persentase tanggapan responden dengan kategori cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah indikator penggolongan dikategorikan baik artinya proses penggolongan atau pengidentifikasian yang dilakukan oleh setiap SKPD Pemerintah Kota Cimahi telah dilakukan dengan baik, selanjutnya indikator pelaporan dan indikator pencatatan dikategorikan cukup baik hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Cimahi yang disebabkan oleh proses pencatatan yang belum efektif, terkendala dengan pencatatan dan pelaporan aset yang masih belum dapat dijelaskan dan terdokumentasikan.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada sistem akuntansi keuangan daerah dilihat melalui nilai *loading factor*, dapat dilakukan dengan meningkatkan fakor pencatatan (0,820), pengidentifikasian atau penggolongan (0,819) dan pelaporan (0,802) selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu *input* (0,886), *process* (0,769), *output* (0,836), *outcome* (0,848), benefit (0,819), dan *impact* (0,840).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efesiensi, dan efektivitas (*value for money*), akuntansi memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. (Mardiasmo,2009:35). Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. (Mardiasmo, 2009:84)

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam mengelola keuangan daerah yang baik dibutuhkan yang namanya sistem akuntansi yang mengatur keuangan daerah agar terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam hal ini pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah. (Usman dan Lukman, 2014)

Dengan adanya permasalahan pada sistem akuntansi keuangan daerah mengenai pencatatan dan pelaporan, peneliti memberikan solusi yaitu pada proses pencatatan harus dilakukan dengan lebih teliti supaya menghindari transaksi yang tidak tercatat dan agar terdokumentasikan, perlu dilakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi maupun aset dan persedian, dan peningkatan sistem atau aplikasi yang memadai agar proses pencatatan dan pelaporan lebih efektif.

4.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis KInerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 19,5% terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,537 yang berarti anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang cukup baik arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi. Arah hubungan positif anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah menunjukan bahwa anggaran berbasis kinerja yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 19,5% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 80,5% antara lain Pengawasan Internal (Ira Halidayati, 2009), Pengelolaan Keuangan Daerah (Rahmad Hidayat, 2009), Partisipasi Anggaran (Rahmi Nur Emilia, Willy Abdillah, dan Abdullah, 2013), Penerapan Good Government (Rico Ales Sndra, Kennedy, Rheny, 2014), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sem Paulus Silalahi, 2012).

Kemudian hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai persentase tanggapan responden dengan kategori cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan responden adalah indikator pelaporan kerja dengan kategori baik hal ini menunjukan bahwa pelaporan kinerja pada pertanggungjawaban APBD pada setiap SKPD Pemerintah Kota Cimahi telah sesui dengan prosedur, indikator evaluasi kerja dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan evaluasi kerja pada SKPD Pemkot Cimahi masih belum optimal disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan supervisi kegiatan dari walikota maupun DPRD terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD, indikator perencanaan strategi dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan bahwa perencanaan strategi pada SKPD Pemkot Cimahi masih belum optimal hal ini dikarenakan pada SKPD Pemkot Cimahi banyaknya proyek pembangunan yang tidak terlaksana, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya perencanaan, indikator perumusan strategi dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan bahwa perumusan stategi pada SKPD Pemkot Cimahi masih belum efektif dikarenakan visi dan misi yang dibuat belum sesuai dengan tujuan, indikator penganggaran dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan bahwa program yang telah ditetapkan belum sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan, indikator penyusunan program dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan bahwa penyusunan program pada SKPD Pemkot Cimahi masih belum dilakukan dengan optimal dikarenakan banyak kasus dan kegiatan yang belum matang atau selesai perencanaannya terkadang dipaksakan masuk dalam tahun anggaran berjalan, dan dengan tanggapan responden yang paling rendah adalah indikator implementasi dengan kategori cukup baik hal ini menunjukan bahwa implementasi pada SKPD Pemkot Cimahi masih belum optimal yang disebakan banyak proyek pekerjaan di Pemkot Cimahi yang gagal direalisasikan atau terlambat dikerjakan. Salah satu contohnya yakni gagalnya proyek pembangunan sumur artesis di sejumlah titik di Cimahi yang menelan dana miliaran rupiah dan penyerapan anggaran yang rendah baru terserap 55%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada anggaran berbasis kinerja dilihat melalui nilai *loading factor*, dapat dilakukan dengan meningkatkan fakor perumusan strategi (0,875), perencanaan strategi (0,866), penyusunan program (0,884), penganggaran (0,768), implementasi (0,783), pelaporan kinerja (0,874), evaluasi kinerja (0,883), dan umpan balik (0,858) selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu *input* (0,886), *process* (0,769), *output* (0,836), *outcome* (0,848), benefit (0,819), dan *impact* (0,840).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana anggaran berbasis kinerja yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemeritah Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas, dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja (Abdul Halim, 2012:51). Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2009:40).

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) (Sem Paulus Silahi, 2012).

Dengan adanya permasalahan pada anggaran berbasis kinerja, peneliti memberikan solusi yaitu Pemerintah Kota Cimahi harus lebih memberikan pengawasan penuh pada anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh setiap SKPD atas input, ouput pada setiap penggunaaan anggran. Bagi pengguna anggaran agar mempertanggungjawabkan dalam pencapaian kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan secara efektif dan efesien. Serta untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman yang adil bagi para SKPD, sehingga hal tersebut dapat memicu motivasi SKPD untuk melaksanakan tugasnya dengan baik agar dapat mewujudkan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

V. Simpulan Dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi, artinya semaikin baik sistem akuntansi keuangan daerah dalam melakukan pencatatan, penggolongan atau pengidentifikasian, dan pelaporan maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun pada pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah pada sistem akuntansi keuangan daerah seperti:
    a. Masih terdapat kegiatan pencatatan yang belum efektif.
    b. Pelaporan aset yang masih belum dapat dijelaskan dan terdokumentasikan.
2. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi, artinya semaikin baik anggaran berbasis kinerja dalam melakukan perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan umpan balik maka hal tersebut akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun pada pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah pada anggaran berbasis kinerja seperti:
    a. Perencanaan yang masih belum optimal.
    b. Kegiatan yang belum matang atau selesai perencanaannya terkadang dipaksakan masuk dalam tahun anggaran berjalan.
    c. Implementasi yang belum efektif seperti banyak proyek pekerjaan yang terlambat dikerjakan dan rendahnya penyerapan anggaran.
    d. Lemahnya sistem pengawasan dan supervise kegiatan dari Walikota maupun DPRD.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a. Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah pada proses pencatatan harus dilakukan dengan lebih teliti supaya menghindari transaksi yang tidak tercatat dan agar terdokumentasikan, perlu dilakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi maupun aset dan persedian, dan peningkatan sistem atau aplikasi yang memadai agar proses pencatatan dan pelaporan lebih efektif.
b. Untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja setiap SKPD Pemerintah Kota Cimahi harus lebih memberikan pengawasan penuh pada anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh setiap SKPD atas input, ouput setiap penggunaaan anggaran. Bagi pengguna anggaran agar mempertanggungjawabkan dalam pencapaian kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan secara efektif dan efesien. Serta untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan pemberian penghargaan dan hukuman yang adil bagi para SKPD, sehingga hal tersebut dapat memicu motivasi SKPD untuk melaksanakan tugasnya dengan baik agar dapat mewujudkan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.

2. Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah seperti pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, partisipasi anggaran, penerapan good government, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta menambah indikatornya, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar memperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A, Erwan., dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim & Syam Kusufi . 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 4.

Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, I Wayan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kapita Selekta Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Ade Indah Wahyuni. .*Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Adang Jukardi. 2015. *Pemerintah Kabupaten Sumedang Genjot Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Pikiran Rakyat.

Aida Siti Hamidah. *Pengaruh Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemrintah (Survei Pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Askam Tuasikal. 2009. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)*. Universitas Pattimura Ambon. Ambon. ISSN: 1410-8623

Asrori. 2009. *Model Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Partisipasi Pengguna*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2085-4277

Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bambang Sancoko, dkk. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Barker et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Jatinangor: FOKUSMEDIA

Dana Siswar. 2010. *Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Kaitannya dengan Value For Money dan Pengaruhnya Terhadap Pengukuran Kinerja Lembaga Pemerintah*. Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. ISSN: 0852 - 9124 Vol. 1 No.1

Deddi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat

Dpd. 2010. Kinerja Pemerintah Daerah Menjelaskan Kemajuan. Melalui <http://www.dpd.go.id/artikel-kinerja-pemerintah-daerah-menjelaskan-kemajuan>

Deddi Nordiawan dkk, 2014. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat

Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.

Erna Sari, Saiful, Nila Aprila. 2013. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Bengkulu. Bengkulu. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 3, 2013: 19- 29 ISSN 2303-0348

Fauzi Wahyudi Manggopa. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinera terhadap Kinerja SKPD Dilingkungan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Gorontalo.

Fuad Hisyamudin. 2014. *Pengamat: Kinerja SKPD Kota Cimahi Memprihatinkan*. Melalui <http://m.inilah.com/news/detail/2119771/pengamat-kinerja-skpd-kota-cimahi-memprihatinkan>

Fuad Hisyamudin. 2015. *Penyerapan Anggaran Kota Cimahi Masih Rendah*. Melalui <http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/46539/penyerapan-anggaran-kota-cimahi-masih-rendah>

Fuad Hisyamudin. 2015. *Serapan Anggaran Rendah, DPRD Cimahi Diminta Tingkatkan Kinerja. Melaui* <http://www.inilahkoran.com/berita /bandung/46739/serapan-anggaran-rendah-dprd-cimahi-diminta-tingkatkan-kinerja>

Gatot. 2015. *Kinerja Pemerintah Cimahi Harus Ditingkatkan*. Melalui <http://fokusjabar.com/2015/11/18/kinerja-pemerintah-cimahi-harus-ditingkatkan/>

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic in Psychology And Education*. 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Bokk Company, Inc.

Hair, J.F, *et al*. 1995. *Multivariate Data Analysis with Readings 4th Edition*. New Jersey: Prentioe-Hall.

Haryanto dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro.

Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tehadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)*. Skripsi. Universitas Hasanudin. Makasar.

Ika Dian Anugerahani, Sentot Imam. 2013. *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, Nomor 2

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Erlanga. Jakarta.

Ira Halidayati. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Ismail Molamahu, dkk. 2015. *Pengaruh Pengelolan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Vol 3, No1

Isyana Putri. 2014*. Pemkot Cimahi Raih Opini WTP*. Melalui <http://www.antarajabar.com/berita/48773/pemkot- cimahi-raih-opini-wtp>

Gala, Merlin. 2008. *Pegaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Skripsi. Universitas Gorontalo.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Andi Offset. Yogyakarta.

Mohamad Irfan. 2015. *Kabupaten Sumedang Kinerja Pemerintah Daerah Terendah*. Melalui<http://microsite.metrotvnews.com/beritampr/read/2015/11/16/451178 /surveikabupaten-sumedang-kinerja-pemda-terendah-di-jab>

Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Munandar. 2010. *Budgeting, Perencanaan Kerja. Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajahmada.

Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Edisi Pertama, Penerbit BPFE.

Nurlaela Yuliani. 2014. *Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik*. Tesis. UGM.

Nurlan Derise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.

Rahmad Hidayat. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol.3, No.1.

Rico Ales Sandra, Kennedy, Rheny. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Good Goverment terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Riau. Pekanbaru. JOM FEKON Vol. 1 No. 2.

Ruzuar. 2015. *Sosialisasi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Bappeda Jawa Barat*. Bpkp. Melalui <http://www.bpkp.go.id/jabar/

berita/read/14096/0/Sosialisasi-Penerapan-Sistem-Akuntansi-Pemerintah Berbasis-Akrual-di-Bappeda-Jawa-Barat.bpkp>

Salbiah, Ridha Rizky. 2012. *Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal. Universita Sumatera Utara. Vol 15, No 2.

Sem Paulus Silalahi. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemrintahan di Kota Dumai)*. Jurnal Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Volume 20, Nomor 3.

Subana, M. Dan Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung:CV Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfa Beta: Bandung.

Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*: Alfa Beta, Bandung.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Syambudi Prasetia Bahri. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis KInerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Skripsi.Universitas Pasundan. Bandung.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Usman, Lukman. 2014. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal-Akuntansi. Universitas Negeri Gorontalo.

Venni Avionita. 2014. *Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah*. Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung

Wawan Sukmana, Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemrintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya*). Jurnal Akuntansi. Universitas Siliwangi. Vol. 4, No. 1,2009 ISSN: 1907-9958

Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration Taylor & Francis Group: CRC Press U.S*

Yustinus Paat. 2015. *Penyerapan Anggaran Rendah, Ini Penyebabnya*. Melalui <http://sp.beritasatu.com/home/ini-penyebab-penyerapan-anggaran-rendah/95107>

Zam. 2015. *Pemerintah Kota Cimahi Lemah Dalam Perencanaan*. Melaui <http://jabar.tribunnews.com/2015/08/24/pemkot-cimahi-lemah-dalam-perencanaan>

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

_____. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (2003).: Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

_____. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lampiran

Outer Model

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
Anggaran	0.722094	0.953987		0.944945
Kinerja	0.695532	0.931890	0.517097	0.913391
Sistem Akuntansi	0.662539	0.854847		0.749289

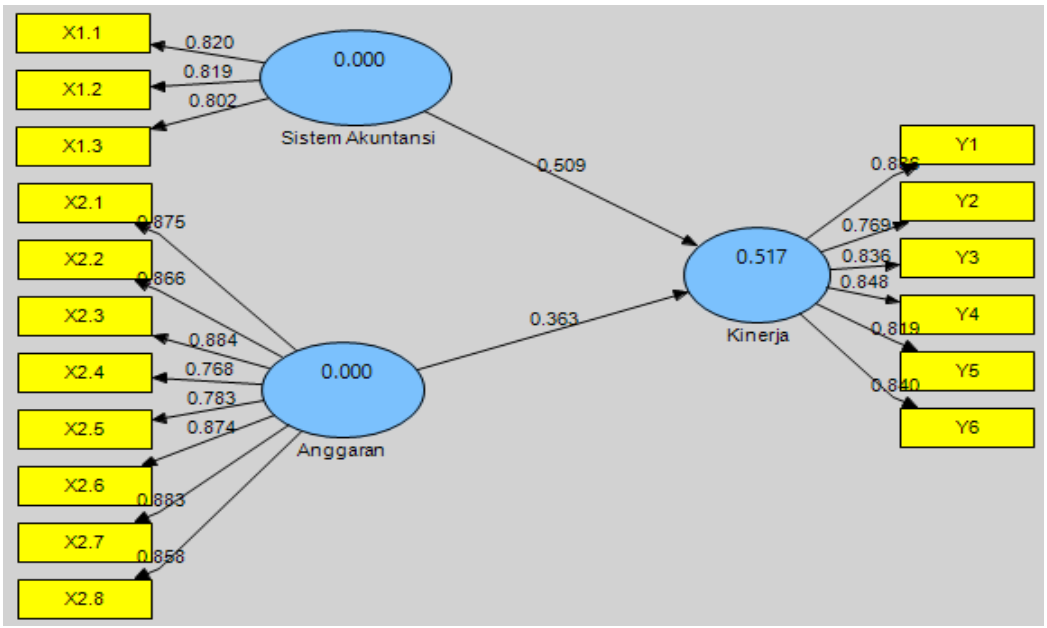
	Anggaran	Kinerja	Sistem Akuntansi
X1.1			0.820438
X1.2			0.819316
X1.3			0.802010
X2.1	0.874740		
X2.2	0.865513		
X2.3	0.883783		
X2.4	0.767896		
X2.5	0.782885		
X2.6	0.874111		
X2.7	0.882584		
X2.8	0.857787		
Y1		0.886149	
Y2		0.768918	
Y3		0.836301	
Y4		0.848383	
Y5		0.819296	
Y6		0.840413	

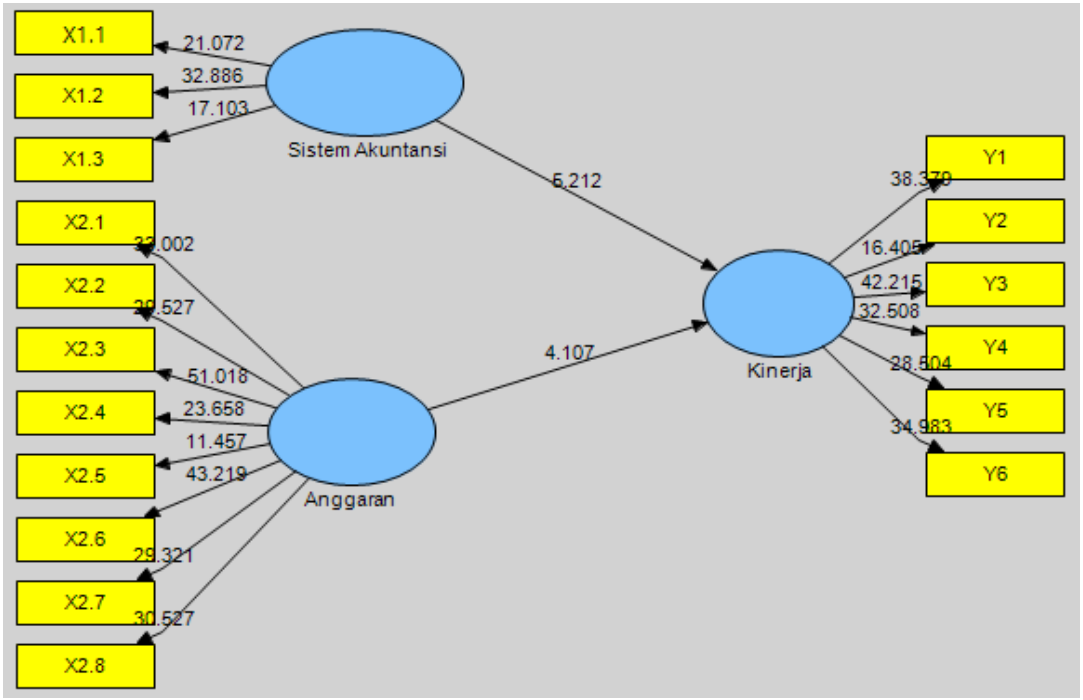
Inner Model

	Anggaran	Kinerja	Sistem Akuntansi
Anggaran	1.000000		
Kinerja	0.537445	1.000000	
Sistem Akuntansi	0.343610	0.633336	1.000000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
Anggaran -> Kinerja	0.362641	0.361853	0.088304	0.088304
Sistem Akuntansi -> Kinerja	0.508729	0.512010	0.097614	0.097614

	T Statistics (|O/STERR|)
Anggaran -> Kinerja	4.106714
Sistem Akuntansi -> Kinerja	5.211639




X1.1
X1.2
X1.3
21.072
32.886
17.103
Sistem Akuntansi
6.212
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
51.018
23.658
11.457
43.219
29.321
30.527
Anggaran
4.107
Kinerja
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
38.379
16.405
42.215
32.508
28.504
34.983